



Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik

Heri Kusmanto*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat dan kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan untuk memperoleh pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan, dalam kebebasan bekerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh akses pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain.

Kata Kunci: Masyarakat; Partisipasi; Demokrasi Politik

Abstract

This study aims to determine the freedom of opinion and the freedom to get a decent life and the freedom to get an education. The method used is descriptive method. The results showed that community development and participation in political democracy such as freedom of opinion, freedom to get a decent life and freedom of access to education can be categorized as good, this can be seen in every village development meeting, every citizen is given the freedom to aspire or accept criticism, in freedom of work, citizens have the freedom to work according to their education and expertise, as well as in obtaining education services, all citizens always get the same access to education as other citizens.

Keywords: Society; Participation; Political Democracy

How to Cite: Kusmanto, H, (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 78-90

*Corresponding author:

E-mail: kusmantoheri@gmail.com

p-ISSN: 2549 1660

e-ISSN: 2550-1305

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah ide besar yang mengubah wajah perpolitikan dunia. Munculnya demokrasi memberi harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Ketika sistem politik dunia masih bersifat monarki apalagi monarki absolut, kekuasaan mutlak ada di tangan raja. Kekuasaan menjadi tersentralisasi di satu tangan yaitu di tangan para raja. Sebaliknya, rakyat telah dijadikan sebagai obyek kekuasaan yang tak jarang selalu dieksploitasi, ditindas dan dikebiri hak-haknya. Ketika demokrasi hadir sebagai konsep yang baru dalam sistem perpolitikan, maka disitulah secara eksplisit telah terjadi peralihan kekuasaan. Kekuasaan yang sebelumnya mutlak ada di tangan raja, maka untuk selanjutnya berada di tangan rakyat. Raja atau presiden bukan lagi sebagai titisan dewa atau mahluk suci yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tetapi sebaliknya ia adalah abdi rakyat, pelayan rakyat.

Keseluruhan kebijakan yang dijalkannya harus sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Dalam konteks demokrasi yang berlaku adalah suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*), dan bukan sebaliknya. Ini artinya rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan, rakyatlah pemegang kedaulatan, sementara pemimpin atau presiden adalah pelaksana dari kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya. Ini mengindikasikan bahwa keharusan adanya control dan kritik dari rakyat untuk para pemimpin. Kalau seandainya ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka rakyat berhak dan bahkan harus mengkritik terhadap pemimpin tersebut. Pemimpin yang di era monarki dianggap tidak boleh dikritik dan pengawasan dari rakyat, di era demokrasi justru menjadi sebuah keharusan. Konsep *cek and balance* (kontrol dan keseimbangan) dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan. Partai oposisi harus diadakan. Karena tanpa itu semua, kekuasaan akan cenderung

mengental pada satu pusat sehingga yang ada adalah otoritarianisme baru.

Inilah yang terjadi di Indonesia ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Karena tidak adanya sistem kontrol dan keseimbangan kekuasaan, maka kekuasaan hanya terpusat pada rezim ORBA yang pada waktu itu dikendalikan oleh Soeharto dan kawan-kawan. Dan efeknya jelas, banyak hak-hak rakyat yang diabaikan dan bahkan dilupakan dan diinjak-injak oleh penguasa. Kebebasan pers dibrangus, gerakan massa diawasi, nalar kritis dicurigai dan sebagainya. Selanjutnya, dengan dilegalkannya sistem kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi, hal itu menandakan perlunya ruang kebebasan bagi rakyat.

Demokrasi mengamanahkan adanya kebebasan yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak, kebebasan memperoleh akses pendidikan dan sebagainya adalah sasaran demokrasi. Namun meskipun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan yang tanpa batas dan cenderung anarki. Sebab, kebebasan seperti itu cenderung tidak mematuhi supremasi hukum. Padahal yang namanya demokrasi sarat utama adalah ia harus berdiri di atas supremasi hukum. Demokrasi tanpa hukum sama halnya bohong karena yang terjadi nantinya adalah pola kehidupan rimba. Sehingga yang kuatlah yang berkuasa. Padahal dengan mengalihkan kekuasaan dari tangan penguasa ke tangan rakyat adalah upaya untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebaikan sosial. Semua tujuan itu kalau tanpa ditopang oleh sistem hukum yang memadai.

Indonesia adalah salah satu negara yang sekarang masih dalam era transisi demokrasi. Di era transisi demokrasi ini, demokrasi masih mengalami banyak kendala. Sehingga demokrasi sebagai sistem yang ideal untuk membangun masa depan Indonesia belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Karena realitasnya

sekarang masih banyak dijumpai berbagai kesenjangan ekonomi, KKN yang merajalela, kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang membludak dan sebagainya.

Demokrasi harus mampu mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus mampu menjadi jalan bagi masyarakat untuk menggapai kemakmuran dan kebahagiaannya baik secara jasmani maupun rohani. Namun di era konsolidasi demokrasi ini, demokrasi yang diterapkan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Sistem demokrasi di Indonesia sekarang secara substansial belum nampak membawa perbaikan kehidupan masyarakat secara konkrit. Buktinya masih dijumpai banyaknya masyarakat miskin, tingginya pengangguran, mahalannya pendidikan, mahalannya kesehatan, tindak kekerasan dan anarkhisme yang terus menghiasi relasi sosial, KKN yang semakin merajalela dan sebagainya.

Semua ini merupakan masalah-masalah sosial-politik yang bertentangan dan kontra produktif dengan spirit demokrasi. Ketika sistem demokrasi, sebagaimana yang ada dalam sila ke empat, secara filosofis dan maknawi menjadi ruh dan spirit terealisasinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke 5), bukankah sebuah paradok kalau kenyataannya banyak elit politik yang hidupnya mewah dan glamor, mempunyai banyak simpanan, kawin-cerai, sering plesir ke luar negeri, mempunyai kekayaan yang melimpah, sementara sebagian besar masyarakat bawah justru berada dalam kungkungan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi-politik di Indonesia sekarang, baru bisa dinikmati oleh segelintir orang atau kelas elit sosial di negeri ini. Sementara mayoritas rakyat bawah yang dalam sistem demokrasi merupakan pemilik kedaulatan, justru hidupnya berada dalam kesengsaraan dan ketertindasan. Artinya demokrasi sekarang

yang tengah berjalan di Indonesia ini adalah baru sebatas demokrasi prosedural. Secara substansial Indonesia masih sangat jauh dari nilai-nilai dan spirit demokrasi.

Demokrasi masih berjalan di tingkat prosedur itu, polanya masih bersifat simbolik. Demokrasi hanya dimanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga formal pemerintahan, pemilu, pilkada dan sejenisnya. Namun lembaga-lembaga dan agenda-agenda tersebut tidak memberi dampak positif yang konkrit terhadap kondisi sosial ekonomi-politik masyarakat. Meskipun ada parlemen, presiden dan lembaga kehakiman, kemudian ada sistem pemilihan umum bersifat langsung dan sebagainya, namun kenyataannya kehidupan masyarakat bawah tetap berada dalam kondisi miskin, lapar, terbelakang dan menderita. Demokrasi politik tidak mampu membawa angin perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam konteks tertentu justru menampilkan jurang kesenjangan yang lebar antara elit politik dan rakyatnya.

PEMBAHASAN

Demokrasi adalah suatu yang dianggap penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain demokrasi dipandang sangat penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik.

Zanikhan (2008:20) mengatakan bahwa: "Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai

indikator perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Husein (2005:2) menyatakan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitan pembagian kekuasaan dalam suatu Negara. Prinsip *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Husin, (2005:2) menyatakan: Ciri-ciri dan unsur-unsur demokrasi dapat dilihat dari beberapa kategori yakni pertama, legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Kedua, pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargainng*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.

Pada masa Romawi, tuntutan akan demokrasi dengan pengertian; Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, tidak seperti sekarang. Tuntutan demokrasi saat itu hanya sebuah upaya untuk mewujudkan satu masyarakat yang tidak mengklasifikasikan anggota masyarakatnya, antara tuan dan hamba, atau kaum ningrat di satu pihak dan budak-budak di pihak lain. Artinya ada tuntutan persamaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Adapun sekarang, konsep demokrasi telah dihubungkan dengan ide tentang pemilu.

Maka memberikan 'hak pilih' bagi semua individu dalam masyarakat, laki-laki atau perempuan, merupakan sebuah semangat persamaan (egaliter) yang realistis saat ini.

Adapun unsur-unsur demokrasi menurut Husin, (2005: 3) meliputi: 1. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negaranya. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem kekuatan mayoritas

Selain dari unsur yang dikemukakan di atas ada dua kata penting dalam demokrasi tersebut yaitu persamaan dan kebebasan atau kemerdekaan. Persamaan harus diartikan sebagai: 1. Persamaan dan kedudukan serta martabat manusia dihadapan Tuhan. 2. Persamaan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri secara maksimal. 3. Persamaan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan pribadinya.

Budiarjo, (1997: 40) merumuskan beberapa nilai demokrasi yaitu: 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. 7. Akhirnya dapat dibentangkan disini bahwa melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang diselenggarakan oleh lembaga negara.

Selain nilai-nilai yang dikemukakan di atas, masih ada nilai-nilai yang melekat pada pengertian demokrasi yang dikemukakan Suprpto (2001:23) berikut: 1. Keterlibatan warga negara di dalam pengambilan keputusan politik. 2. Tingkat tertentu persamaan. 3. Kebebasan atau kemerdekaan dan perlindungan terhadap martabat manusia. 4. Sistem perwakilan. 5. Pemerintahan berdasarkan hukum. 6.

Sistem yang menjamin pemerintah oleh masyarakat. 7. Pendidikan yang memadai dari rakyat baik yang bersifat umum maupun pendidikan politik.

Dari pendapat di atas dapatlah diketahui bahwa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Saat ini konsep demokrasi merupakan kata kunci dalam bidang politik, dan menjadi indikator perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara untuk mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan kewenangan eksekutif (lembaga eksekutif), lembaga pengadilan yang berwenang menjalankan kewenangan yudikatif (lembaga yudikatif) dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan legislatif (lembaga legislatif). Dimana ketiga lembaga negara ini saling lepas (independent) dan sejajar satu sama lain, agar bias saling mengawasi berdasarkan prinsip check and balances.

Menurut Madjid (2006:6), pandangan hidup demokrasi berdasarkan bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengamalan praktis dinegeri yang demokratis maupun paling tidak mencakup tujuan norma-norma antara lain: 1) Pentingnya kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan politik terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. 2) Semangat warga negara mengendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau balikan

"kalah suara". 3) Pandangan hidup demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat guna mencapai pemufakatan yang jujur dan sehat. 4) Terpenuhinya keperluan pokok yaitu pangan, sandang dan papan. 5) Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap saling mempercayai. 6) Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal.

Dari pendapat di atas dapatlah diketahui bahwa demokrasi adalah proses menuju dan menjaga pertahanan masyarakat yang menghormati dan berupaya mereresalisasikan nilai-nilai demokrasi.

Santoso (2005:46), menyebutkan bahwa: Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani "polis". Aristoteles menyebut karyanya mengenai soal-soal negara "Politikom", maka politik berarti seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijakan/tindakan dalam urusan kenegaraan/pemerintah termasuk penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara.

Hal senada dikemukakan Shihab (2000: 416) bahwa: "Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan Latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota."

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa berbicara tentang politik tidak dapat lepas dari soal-soal yang mengenai negara dan pemerintah, dan dapat dikatakan bahwa hidup dan suburnya negara serta tindak tanduk pemerintahanlah yang selalu menjadi sasaran penyorotan dalam bidang politik.

Selanjutnya Muhaimin (1995:70) mengemukakan bahwa: Politik adalah suatu dunia persaingan yang tak henti-hentinya antara kekuatan-kekuatan sosial antara orang dengan orang, keluarga dengan keluarga, suku dengan suku, kelas dengan kelas, daerah dengan daerah. Suatu persaingan yang tidak ditengahi oleh organisasi politik yang lebih

komprehensif tanpa lembaga politik yang kuat. Suatu masyarakat akan kekurangan sarana untuk menetapkan dan memenuhi kepentingannya. Kemampuan untuk menciptakan lembaga-lembaga politik adalah kemampuan untuk menciptakan kepentingan publik.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa politik ada hubungannya dengan negara sebagai suatu organisasi terdepan dalam suatu masyarakat dan khususnya dengan pemerintah sebagai pelaksana dalam suatu negara

Duverger (2000:18), menambahkan bahwa: Kata politik dalam konotasinya yang biasa yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata negara diambil untuk mengartikan kategori bahwa khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Praktisnya ada dua arti negara bangsa (*nation-state*) yang menunjukkan masyarakat nasional yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman tengah dan kini paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi. Negara pemerintah (*government-state*) menunjukkan penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini.

Sejak kelompok orang hidup bersama, masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan mulai muncul dan sejak itulah para pemikir politik mulai membahas masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan mulai muncul dan sejak itu pula para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang mencakup lingkup serta batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan akan pengaturan dan pengawasan sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak

(dalam menghadapi atau menangani satu masalah).

Kekurangan yang krusial yang diderita oleh 'elit modern' di kebanyakan negara, adalah tiadanya hubungan organis antara mereka dengan rakyat, baik di medan politik, sosial maupun budaya, dan bahkan di medan keruhanian dan keagamaan. Karena itu, ketika dikatakan bahwa "semua orang menuntut demokrasi" maka kata 'semua' disini menyesatkan karena ia bukanlah 'semua' secara aktual, melainkan 'semua' dalam arti potensial dan kemungkinan belaka..."

Istilah demokrasi secara literal dan eksplisit memang tidak disebutkan dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun secara substansial dan implisit, Pancasila telah mengamanahkan untuk diterapkannya sistem demokrasi dalam tata laksana perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Sila ke 4 dari Pancasila yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan merupakan dasar idiologis-legal yang dijadikan bangsa Indonesia untuk menerapkan demokrasi.

Sistem demokrasi secara konstitusioanal di setiap negara demokrasi dicerminkan oleh terpisahnya lembaga kekuasaan ke dalam tiga institusi: eksekutif, legislative dan yudikatif. Pola ini adalah lebih mengacu pada konsep Montesquie tentang trias politika. Konsep pemisahan kekuasaan ini merupakan usaha untuk menyeimbangkan kekuasaan ke dalam berbagai segi kekuatan politik. Montesquieu merasa bahwa penyelwengan kekuasaan hanya bisa dihindari dengan pola konstitusional di mana masing-masing unsur tunduk pada batas-batas demi keseimbangan kekuasaan. Dengan meletakkan setiap kategori fungsional pada lembaga pemerintah yang berbeda, monopoli otoritas satu orang atau satu kelompok bisa dihindari, dari kondisi kebebasan politik bisa dijamin lebih baik karena, letika kekuasaan legislative dan eksekutif berada pada orang yang sama, atau ada pada lembaga kehakiman, tidak

bisa ada kemerdekaan; juga tidak ada kemerdekaan jika kekuasaan kehakiman tidak dipisah dari legislatif dan eksekutif. Jika kehakiman dan legisatif digabung maka kehidupan dan kebebasan subyek akan berada di bawah kontrol yang sewenang-wenang karena hakim juga akan menjadi legislator (pembuat undang-undang). Jika ia digabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak dengan kekerasan.

Oleh karena itu, demokrasi sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia belum pernah ada pemerintahan yang bersifat demokratik seperti sekarang, namun sebenarnya unsur-unsurnya sudah ada, yang selama itu tidak pernah dimanfaatkan secara nasional formal.

Selain itu ciri khas demokrasi lainnya adalah adanya sistem musyawarah untuk mencapai keputusan. Hal ini karena sistem demokrasi berusaha untuk mencapai kebaikan bersama, maka semua itu harus dibicarakan yang melibatkan seluruh individu. Hal ini sebagai anitesis sistem monraki yang memutuskan sesuatu dari satu pihak, yakni dari pihak penguasa atau kalau dalam sistem aristokrasi dan oligarki keputusan yang menyangkut urusan publik hanya ditentukan oleh pihak bangsawan atau orang kaya.

Unsur musyawarah dalam demokrasi inilah yang pernah disinggung oleh Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Pada 1 Juni 1945 di tengah sidang *Dokuritsu Zyumbi Tyosakai*, yang pada waktu itu sedang membahas tentang dasar negara Indonesia yang baru berdiri, Bung Karno menyatakan bahwa negara Indoensia bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Selanjutnya Soekarno berkata, sebagaimana dikutip Kaelan (1999:23) berikut: *..kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu."* Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah *permusyawaratan, perwakilan.*

Dari sini maka sebuah demokrasi tidak bisa menafikan unsur musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan persoalan publik. Unsur musyawarah ini menandakan bahwa pola komunikasi tidak berjalan satu arah, bukan vertikal dari atas ke bawah yang sifatnya instruksionis, tetapi lebih bersifat horisontal yang melibatkan dan mengakomodir seluruh aspirasi dan pendapat masyarakat yang berbeda-beda.

Makna sila ke empat Pancasila yang menyiratkan adanya sistem demokrasi, kalau diperinci lebih dalam dan lebih luas lagi, maka unsur-unsur demokras: kerakyatan, permusyawaratan dan kedaulatan rakyat, menurut Kaelan (1999:26) bisa diformulasikan sebagai berikut: 1. Arti yang terkandung dalam pengertian "kerakyatan" adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, yaitu bahwa negara adalah untuk keperluan rakyat. Oleh karena itu maka sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Jadi "kerakyatan" pada hakekatnya lebih luas pengertiannya dibanding dengan pengertian demokrasi, terutama demokrasi politik. 2. Pengertian demokrasi pada hakekatnya terikat dengan kata-kata permusyawaratan/perwakilan. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Hal ini merupakan suatu cita-cita kefilsafatan demokrasi. Terutama dalam kaitannya dengan demokrasi politik, karena cita-cita kefilsafatan demokrasi politik ini, merupakan syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan. 3. Dalam pengertian "kerakyatan" terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial-ekonomi. Demokrasi sosial -ekonomi adalah untuk pelaksanaan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan (social) dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi tersebut harus dengan syarat demokrasi politik.

Dengan demikian maka dalam sila keempat senantiasa terkandung dasar bagi cita-cita kefilsafatan yang terkandung

dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*" yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata "*Participation*" berasal dari kata "*Participate*" yang berarti mengikutsertakan. Seiring dengan definisi tersebut partisipasi dapat diartikan sebagai turut serta berperan serta atau keikutsertaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia (1996:56), definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan".

Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalnya berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan pun menyetujui untuk melakukannya.

Sastropetro (2000: 12) mengemukakan pengertian partisipasi adalah: "Keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama".

Jenis-jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropetro (2000:12), sebagai berikut: a. Partisipasi dalam pikiran, dalam hal ini partisipasi berupa mengusulkan pendapat dan merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan suatu kegiatan atau program. b. Partisipasi dalam tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program dapat berjalan lancar. c. Partisipasi dalam keahlian, bentuk partisipasi ini adalah berdasarkan dari tingkat keahlian, keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh masyarakat.

Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi atau keikutsertaan yang

dapat berupa kontribusi melalui uang, barang dan jasa.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan yang melibatkan pikiran, tenaga, keahlian dan fasilitas yang ada pada mereka.

Di dalam bahasa Inggris dipergunakan dengan istilah "*society*" yang sebelumnya berasal dari kata "*socius*" berarti kawan yang lama-kelamaan berubah menjadi bersama-sama. Masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat terdiri dari sekumpulan manusia yang berinteraksi dan merupakan kesatuan sosial. Masyarakat memiliki ciri-ciri yang menurut Soekanto (2004: 32) dinyatakan sebagai berikut: a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jauh manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama. b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia, akan timbulnya manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, mersa dan mengerti, mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut. c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena

setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas, selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama.

Di setiap zaman dan tempat, rakyat selalu bertujuan ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari berbagai tirani sosial. Betapapun seseorang telah mempunyai kekayaan, sedang disekitarnya terdapat orang-orang yang jauh lebih kaya dari dia dan memiliki kemudahan akses di pelbagai bidang, hal ini akan memunculkan perasaan kekurangan (*inferior*), dan merasa adanya tirani sosial. Karena perasaan kekurangan tersebut sudah sangat cukup untuk membuatnya hidup dalam kecemasan dan kemuraman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan rakyat adalah menciptakan keadaan dimana mereka bisa hidup tanpa kecemasan dan kemuraman. Dalam menciptakan keadaan yang seperti itu, mereka melawan keadaan tiranik yang terdapat didalamnya. Yaitu keadaan yang mempermudah kelompok tertentu dalam masyarakat untuk meraih hidup "makmur dan terhormat."

Dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, apakah demokrasi politik dapat mewujudkan tujuan-tujuan rakyat? Tampaknya harus diakui bahwa demokrasi politik adalah demokrasi bagi para penguasa dan orang-orang kaya. Namun hal tersebut bisa jadi tidak, jika dilihat dari sisi lain, demokrasi politik merupakan sarana yang jika digunakan dengan baik akan banyak membantu menyingkap hakikat masalah sosial, seperti kemiskinan, ketertindasan, biaya pendidikan yang mahal, kesehatan dan lain sebagainya. Demokrasi politik yang mengklaim mampu memperkuat dan menancapkan kebebasan publik akan dapat memberikan banyak peluang untuk membuka pikiran rakyat terhadap hakikat konflik sosial. Dengan kata lain, demokrasi

politik merupakan sarana yang niscaya bagi kesadaran rakyat.

Adanya parlemen, partai-partai dan kebebasan pers serta masa-masa pemilu, merupakan peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh demokrasi politik dalam rangka menyadarkan rakyat dan mengarahkan pada perjuangan akan hak-hak mereka. Penyadaran rakyat tersimpul pada upaya memberikan pengertian bahwa solusi yang tepat bagi masalah sosial ini terletak pada upaya mengubah keadaan yang merugikan mereka. Kesejahteraan para petani, misalnya, tidak akan terwujud, *taken for granted*, dengan perpindahan mereka ke barisan para pemilik tanah, karena memang tidak mungkin mencapainya. Kalaupun berhasil, hal tersebut tercapai dengan mengorbankan banyak petani lainnya. Begitu pula para buruh, mereka tidak bisa mencapai kesejahteraan hidup hanya dengan cara memperbaiki upah mereka. Karena meskipun hal itu terpenuhi, mereka akan tetap tereksplotasi dan kekurangan. Persoalannya bukan masalah upah, melainkan keadaan sosial dan pengaturan kehidupan masyarakat. Kaum tertindas harus memahami, bahwa demokrasi yang sesungguhnya, keadilan sosial dan persamaan tidak akan terwujud kecuali dengan perjuangan, satu perjuangan yang terarah pada tujuan.

Dari sini semakin jelas bahwa tugas ini tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dalam naungan kebebasan publik. Disinilah tampak hubungan antara demokrasi politik dan demokrasi sosial. Hubungan yang bersifat dialektik. Demokrasi sosial tidak akan terwujud kecuali dalam lingkungan demokrasi politik, dan yang terakhir tidak akan terwujud dengan murni dan bersih kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikuasai demokrasi sosial. Perjuangan kelas tertindas semestinya memperjuangkan untuk kebebasan publik, yakni demokrasi politik sebagai sarana, dan demokrasi sosial sebagai tujuan.

Kemandirian masyarakat yang terlibat aktif dalam rapat untuk pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa). Arah pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disadari karena menghormati pendapat orang lain adalah etika dalam rapat. Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan alam pikirannya. Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara.

Kritikan itu harus jelas dulu, ingin keadaan ke arah yang lebih baik, sekedar berkoar-koar melepas stress ataukah upaya jahat ingin menjatuhkan orang lain. Tapi kritik yang diberikan merupakan upaya meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari inti rapat yang dilaksanakan. Sebagian besar orang menanggapi kritik dengan melakukan pembelaan diri, hal ini seperti sebuah gerak reflek yang tidak bisa ditahan. Kritik adalah umpan balik penting demi pengembangan diri. Jangan pernah bersikap negative terhadap kritikan bahkan sekalipun itu berasal dari orang yang lebih muda. Bersikaplah terbuka terhadap kritikan dan lihatlah diri semakin hari semakin baik.

Tak ada orang yang senang menerima kritik. Bagaimana pun hebatnya seseorang, ia pasti tak akan kebal dari kritik. Pertama, karena tak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan. Kedua, banyak orang

yang senang mengkritik, meskipun mereka tahu dikritik itu tidak enak. Memang tidak semua kritik itu benar. Namun, bagaimana kita mensikapi kritik sebenarnya dapat mendorong perbaikan bagi kepribadian seseorang.

Kepala desa yang bijaksana memang impian semua warga desa Bondarsihudon. Kepala desa dengan kepemimpinannya diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan yang selama ini dilaksanakan didesa, banyak program kerja yang dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti melalui lembaga-lembaga resmi yang ada atau mendirikan lembaga-lembaga baru yang dapat menyalurkan bantuan kredit dengan syarat ringan dan posedor yang tidak berbelit-belit, supaya masyarakat tertarik untuk mengambilnya.

Selalu menahan diri dan tidak cepat menjatuhkan penilaian negative kepada warga lain yang sedang mengemukakan pendapat dalam rapat pembangunan desa. Hal ini disadari karena setiap manusia memiliki jalan pikiran masing-masing dan memiliki alasan masing-masing, jadi sangat etis rasanya untuk mematahkan pendapat orang lain, tanpa terlebih dahulu mengetahui alasan terdalam sehingga orang tersebut memiliki pendapat lain. Setiap permasalahan di desa selayaknya diputuskan secara bersama, sehingga hasil keputusan tersebut dapat diketahui oleh seluruh warga desa. Keputusan dalam rapat hendaknya diambil secara bebas dan rasional, dalam arti kata keputusan tersebut adalah keputusan seluruh warga dan seluruh warga juga mampu menerima keputusan tersebut serta mampu melaksanakannya.

Demokrasi politik dalam pengambilan keputusan secara adil belum sepenuhnya dilaksanakan masyarakat desa Bondarsihudon. Padahal dapat suatu rapat seharusnya keputusan diambil secara adil, dalam arti dalam pengambilan keputusan tersebut tidak ada masyarakat yang diuntungkan dan yang merasa dirugikan.

Ini merupakan salah satu bukti bahwa warga masyarakat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dalam arti kata pasti satu waktu pasti akan menghadapi kesalahan, dan jika kesalahan tersebut diingatkan oleh warga lain, maka selayaknya dapat menerima dengan lapang dada.

Menggunakan hak pilih dalam ajang pemilihan kepala desa, yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi pula memperjuangkan nasib masyarakat. Antusiasme itu bisa dilihat dari berbondong-bondongnya warga menuju tempat TPS masing-masing, bahkan hingga jelang jam penutupan tibapun warga masih ada yang datang dan ikut antre menunggu giliran.

Salah satu hasil diskusi tersebut adalah Pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga). Pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) adalah pembangunan yang meletakkan wilayah (*locus*) pembangunan di tingkat lingkungan sebagai basis utama pembangunan. Masyarakat RT yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis, sekaligus pelaku utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: pemberdayaan ekonomi, seperti program banuan usaha bagi warga miskin, pemberdayaan politik

seperti peningkatan kesadaran dan swadaya politik warga, pemberdayaan sosial budaya, seperti pengembangan potensi kearifan lokal dan lainnya. Peningkatan partisipasi (peran serta) masyarakat antara lain melalui; pelaksanaan dan pengembangan musyawarah Rencana Pembangunan RT (Musrenbang RT), pendampingan warga, pelatihan-pelatihan, dan lainnya. Dalam meningkatkan partisipasi semua warga desa Bondarsihudon, telah dilakukan penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah lembaga RT.

SIMPULAN

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Meskipun pemilu tidak mewakili makna dari demokrasi, akan tetapi merupakan bagian dari demokrasi, namun dalam mengemukakan pendapat, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh akses pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak mampu menjadi saran representasi hak rakyat, ia harus dibangun berdasarkan demokrasi itu sendiri, yakni berdasarkan kesamaan dalam hal

peluang, kemungkinan-kemungkinan dan penggunaan berbagai sarana. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menghasilkan para penguasa dari kelompok tertentu atau kelas tertentu, yakni kelas yang selalu berkuasa dalam kondisi masyarakat yang masih membutuhkan persamaan hak. Yaitu persamaan hak dalam kebebasan politik agar rakyat dapat melaksanakan kewajiban memilih dan persamaan hak dalam kebebasan ekonomi yang memungkinkan setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan sarana-sarana dan peluang-peluang yang dimilikinya. Persamaan hak dan kewajiban di pelbagai situasi kehidupan, baik dalam segi hukum, birokrasi, pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi kebebasan politik dan kebebasan ekonomi seringkali hanya dapat dinikmati oleh "lapisan atas" seiring kondisi rakyat yang sangat tidak seimbang. Kebebasan akan berubah menjadi perbudakan dan eksploitasi apabila terdapat kesenjangan dalam kemampuan menikmati. Kebebasan rakyat hanya akan bermakna eksploitasi dan tirani jika individu-individu didalamnya hidup dalam situasi yang tidak setara.

Jika demokrasi masih ingin dipercaya sebagai sistem yang efektif dan paling baik untuk diterapkan pada saat ini, maka harus ada upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke level substansialnya. Artinya manifestasi demokrasi tidak cukup diukur dari pola-pola konvensional-formal-simbolik, tetapi secara konkrit juga harus membawa kesejahteraan sosial-ekonomi-politik terhadap masyarakat seluruhnya tanpa memandang ras, kelas dan kelompok.

Kalau nilai-nilai substansial demokrasi itu gagal terimplementasikan, maka demokrasi di Indonesia hanya menjadi pepesan kosong belakang.

Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi politik sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut pelaksanaannya di lapangan.

Perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan, dalam kebebasan berkerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh akses pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. 2008. Pengantar Statistik. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, M. 1993. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa
- Arikunto, S. 2001. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Taher, B. 1997 Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi. Jakarta: Yayasan Paramadina. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Duverger, M. 2000. *Sosiologi Politik*. Penj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Husin, S. 2005. *Ilmu Kewarganegaraan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

- Kaelan. 1999. *Demokrasi Politik Kerakyatan; Sebuah Konflik dan Perjuangan*. Bandung: Rosda.
- Madjid, N. 2006. *Islam Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Sinar Harapan
- Muhaimin, Y. 1995. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjahmada Press
- Santoso, Edi. 2005. *Ensiklopedi Politik*. Jakarta: Locakaraka
- Sastropoetro, Santoso. 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Shihab, Q. 2000. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan
- Soekanto, S. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Suprpto. 2001. *Moralitas Politik Dan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.